

[KEPEMIMPINAN ORGANISASI ISLAM: STUDI PUSTAKA PERAN BUYA  
HAMKA DALAM MAJELIS ULAMA INDONESIA (1975–1981)]

[El Firdausia Yahfis]<sup>1</sup>, [Hasnah Faizah]<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>[Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas Riau, Indonesia]

<sup>1</sup>E-mail: el.firdausia6057@grad.unri.ac.id

<sup>2</sup>E-mail: hasnah.faizah@lecturer.unri.ac.id

### Abstrak

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gaya kepemimpinan Buya Hamka dalam konteks kepemimpinan organisasi Islam, khususnya ketika beliau memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975-1981. Data pada penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan Buya Hamka, arsip MUI, dan publikasi media massa yang membahas kiprah Buya Hamka pada masa kepemimpinannya. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik catat. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan Buya Hamka berorientasi pada moralitas dan independensi yang memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan organisasi keagamaan di era modern.

**Kata Kunci:** Buya Hamka, kepemimpinan Islam, kepemimpinan moral, kepemimpinan independen, MUI.

### Abstrac

---

This research aims to examine Buya Hamka's leadership style in the context of Islamic organizational leadership, especially when he led the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1975-1981. The data in this study was obtained from Buya



Hamka's writings, MUI archives, and mass media publications that discussed Buya Hamka's work during his leadership. Data was collected using documentation techniques and recording techniques. Data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusions. The results of the study show that Buya Hamka's leadership is oriented towards morality and independence which has strong relevance for the development of religious organizations in the modern era.

**Keywords:** Buya Hamka, Islamic leadership, moral leadership, independent leadership, MUI.

## A. Pendahuluan

Kepemimpinan dalam organisasi Islam memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian nilai agama sekaligus menjembatani hubungan antara ulama dan negara. Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975, lembaga ini menjadi wadah utama bagi ulama dalam memberikan pandangan keagamaan dan moral kepada masyarakat serta pemerintah. Namun, posisi strategis tersebut juga menghadirkan tantangan besar dalam mempertahankan independensi keulamaan di tengah tekanan politik Orde Baru yang sangat dominan.

Dalam konteks ini, sosok Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) menonjol sebagai figur pemimpin yang tidak hanya dikenal sebagai ulama namun juga sebagai sastrawan, serta simbol moralitas dan keteguhan prinsip. Beliau diangkat menjadi Ketua Umum MUI pertama periode (1975–1981). Buya Hamka banyak mendapatkan pengakuan luas berkat kemampuannya menggabungkan kecerdasan intelektual dengan ketulusan spiritual. Kepemimpinan Hamka di MUI mencapai puncak ujian moral pada tahun 1981. Masalah terjadi ketika beliau menolak dengan tegas permintaan pemerintah untuk mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan umat Islam menghadiri perayaan Natal bersama. Penolakan itu memicu tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri Hamka dari posisinya sebagai Ketua MUI. Pengambilan sikap oleh Hamka tersebut justru mengukuhkan

reputasinya sebagai pemimpin moral yang independen, menegakkan nilai Islam di atas kepentingan kekuasaan

Sebelumnya, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas kiprah Buya Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode 1975–1981. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek historis, sosial, dan politik peran Hamka dalam menjaga independensi ulama di tengah tekanan kekuasaan Orde Baru di antaranya penelitian oleh Amin (2020) yakni *Model Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI): Analisa kepemimpinan Hamka di MUI<sup>1</sup>* dan penelitian oleh Fauzi (2017) yakni *HAMKA sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam menghadapi masalah sosial politik pada masa Orde Baru 1975–1981<sup>2</sup>*. Di antara penelitian tersebut, hanya sedikit yang menelaah gaya kepemimpinan organisasi Hamka secara mendalam dengan pendekatan teori kepemimpinan modern. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menggambarkan peran dan pengaruhnya secara deskriptif, tanpa mengaitkannya dengan konsep-konsep seperti kepemimpinan moral (*moral leadership*), kepemimpinan berbasis nilai (*value-based leadership*), dan kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) dalam konteks Islam, padahal karakter moral dan independen yang ditunjukkan Hamka selama memimpin MUI merepresentasikan model kepemimpinan berbasis nilai yang relevan bagi organisasi Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi pustaka yang sistematis, menelusuri prinsip-prinsip kepemimpinan Buya Hamka berdasarkan sumber primer dan sekunder, serta mengaitkannya dengan teori kepemimpinan Islam modern.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Konsep Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang yang patuh dan lurus (terhadap regulasi) dan tidak mengingkari hal yang sudah disetujui bersama<sup>3</sup>. Pemimpin bukan sekedar orang yang memiliki otoritas

<sup>1</sup> Amin and Dosen, “MODEL KEPEMIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): SEBUAH TAWARAN UNTUK MASA DEPAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI INDONESIA.”

<sup>2</sup> Wildan Insan Fauzi, “HAMKA Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975–1981.”

<sup>3</sup> Arfah, M. Arfah. “Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam”.

formal, melainkan seseorang yang menggerakkan orang lain, yakni anggotanya dengan visi dan nilai yang Ia miliki. Seorang pemimpin sebaiknya memiliki kemampuan emosional, etika, dan integritas yang baik agar terciptanya kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menjadi panutan dari segi moral juga sekaligus menjadi penggerak dalam perubahan yang positif khususnya di ranah sosial. Di era modern ini, teori kepemimpinan berkembang menjadi lebih bersifat humanis yakni menempatkan manusia bukan hanya sebagai objek untuk diatur tetapi juga sebagai subjek yang diajak berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan.

## 2. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. adalah sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada orang yang dipimpinnya, melainkan juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Swt.<sup>4</sup> Kepemimpinan (*imāmah* atau *khilāfah*) merupakan amanah yang di dalamnya terdapat tanggung jawab moral dan spiritual. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam berorientasi pada kebaikan umat, bukan pada kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang beriman memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan kebenaran dan menebar manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Islam menuntut keseimbangan antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, serta antara kekuasaan dan pengabdian.

## 3. Kepemimpinan Moral

Kepemimpinan moral memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai sosial dan religius sehingga ketiganya tidak dapat dipisahkan. Rouf (2020) menyatakan bahwa di dalam agama Islam sangat menekankan kepemimpinan yang berbasis pada karena dalam Islam terdapat konsep tentang *akhlak* yang di dalamnya membahas hubungan baik manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia.<sup>5</sup> Kepemimpinan moral menjadi penting karena krisis

<sup>4</sup> Yolanda et al., "KONSEP KEPEMIMPINAN ABAD 21 DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM."

<sup>5</sup> Rouf, "KEPEMIMPINAN MORAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM; TELAAH MODEL SPIRITUAL DAN PROFETIK."



etika sering menjadi permasalahan dalam organisasi ataupun pemerintahan saat ini. Pemimpin yang memiliki moral menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik melalui kejujuran, tanggung jawab, keberanian menegakkan kebenaran, dan sikap baik lainnya. Dengan demikian, kepemimpinan moral tidak hanya berbicara tentang integritas pribadi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai luhur diterapkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.

### C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada catatan dengan deskripsi yang mendetail, terperinci, lengkap, dan mendalam untuk menyuguhkan penyajian data penelitian.<sup>6</sup> Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis pemikiran, tindakan, dan gaya kepemimpinan Buya Hamka yang tercermin dalam karya-karya tulisnya, arsip organisasi, serta dokumentasi sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode 1975–1981. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) sehingga peneliti tidak langsung melakukan penelitian ke lapangan, melainkan memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku, jurnal, dokumen dan arsip lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

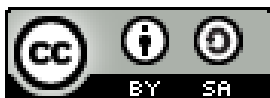
Data dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya tulis Buya Hamka seperti *Mutiara Filsafat* (1954)<sup>7</sup>, *Tafsir Al-Azhar* (1983)<sup>8</sup>, *Falsafah Hidup* (1950)<sup>9</sup> dan pidato-pidato resmi beliau, buku biografi, arsip MUI dan publikasi media massa yang membahas kiprah Buya Hamka dalam kepemimpinan keulamaannya di masa Orde Baru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan catat, yakni mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dan melakukan penelaahan isi (content analysis) terhadap gagasan dan praktik kepemimpinan Buya Hamka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan simpulan.

<sup>6</sup> Yahfis and Sinaga, Mangatur, “Kata Batu Dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif.”

<sup>7</sup> Hamka, *Mutiara Filsafat*.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

<sup>9</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*.



## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Profil Buya Hamka

Buya hamka lahir di Sungai Batang, Maninja, Agam u pada 16 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H). Hamka memiliki nama asli Haji Abdulmalik Karim Amrullah. Ia merupakan putra dari seorang pembawa paham-paham pembaruan Islam di ranah Minangkabau, yakni Dr. H. A. Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Perjalanannya menuntut ilmu agama telah dimulai dari tahun 1916 di sekolahnya. Kemudian, pada tahun 1924 tepatnya di D.I. Yogyakarta, Ia mulai mempelajari ilmu-ilmu mengenai pergerakan Islam dari berbagai guru, salah satunya H.O.S. Tjokroaminoto. Setahun kemudian, Ia pulang ke Padang Panjang, di sanalah Ia memulai sebagai pengarang. Buku pertama yang berhasil Ia tulis berjudul *Chothibul Ummah*. Hamka pindah ke Jakarta pada tahun 1950, bebrapa waktu kemudian, Ia mulai masuk ke dalam pemerintahan yakni sebagai anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan dari Kementerian P.P, terus berjalan hingga pada akhirnya menjadi Ketua MUI pada tahun 1975.

### 2. Konteks Historis Kepemimpinan Buya Hamka di MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. MUI didirikan dengan tujuan untuk MUI dibentuk dengan tujuan untuk; 1) Memberikan fatwa dan nasihat keagamaan bagi umat Islam Indonesia. 2) Menjadi wadah silaturahmi ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai ormas. 3) Menjadi penyambung komunikasi antara umat Islam dan pemerintah dalam kebijakan keagamaan.

Sebelumnya, pada tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru berupaya membangun stabilitas nasional setelah terjadinya gejolak politik 1965–1966. Dari peristiwa tersebut muncullah kebutuhan untuk menyatukan suara ulama dan tokoh Islam dengan tujuan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan bangsa. Pemerintah juga ingin menyalurkan aspirasi umat Islam melalui lembaga yang terorganisasi secara resmi.

Buya Hamka, sebagai seorang ulama karismatik, intelektual, dan tokoh moderat, dipandang mampu menjadi figur yang menjembatani kepentingan umat Islam dan

pemerintah tanpa kehilangan independensi moralnya kemudian ditunjuk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama sejak lembaga tersebut didirikan. Latar historis kemunculan MUI dan kepemimpinan Buya Hamka tak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik dan keagamaan Indonesia saat itu. Pada masa awal pembentukannya di bawah pimpinan Buya Hamka, MUI dihadapkan dengan situasi politik Orde Baru yang menuntut stabilitas dan kontrol terhadap lembaga keagamaan (Latif, 2011).<sup>10</sup> Kepemimpinan Hamka saat menjadi Ketua MUI bukan hanya sekedar administratif saja, melainkan juga kepemimpinan moral yang menjunjung tinggi prinsip keislaman di atas kepentingan politik. Dalam berbagai pidatonya, Hamka menegaskan bahwa MUI harus menjadi “suara hati nurani umat,” bukan corong kekuasaan.

## 2. Gaya Kepemimpinan Moral dan Independen

Buya Hamka merupakan salah satu tokoh penting yang memadukan antara pemikiran, keteladanan, dan praktik kepemimpinan pendidikan. Beliau juga menggabungkan kecerdasan intelektual dengan ketulusan spiritual termasuk dalam konteks kepemimpinan. Hamka dalam buku *Mutiara Filsafat* (1954)<sup>11</sup> menyatakan bahwa sesungguhnya perhiasan yang paling utama bagi penguasa adalah paham akan agama, menuntut rahasiannya, dan mengajak orang lain untuk mengetahuinya, kemudian setelah itu mendekatkan diri kepada Allah. Pernyataan Hamka tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Ia memegang teguh nilai keislaman dalam kepemimpinan, termasuk salah satunya yakni nilai moral. Kepemimpinan Buya Hamka di MUI berakar pada nilai moral (*moral leadership*), yaitu keberanian untuk memegang prinsip meski menghadapi resiko sosial dan politik. Kepemimpinannya tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa pemimpin yang transformasional bertindak berdasarkan nilai-nilai moral serta cita-cita yang dimiliki baik oleh dirinya maupun para pengikutnya.<sup>12</sup> Puncak ketegasan moral itu terlihat dalam peristiwa pertentangan antara MUI dan pemerintah ketika MUI mengemukakan fatwa Natal bersama tahun 1981. Pemerintah menghendaki agar MUI memberikan izin bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristen.

<sup>10</sup> Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.

<sup>11</sup> Hamka, *Mutiara Filsafat*.

<sup>12</sup> Burns, *Leadership*.



Hamka menolak keras permintaan tersebut karena menilai hal itu dapat mengaburkan batas aqidah dan mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk ikut merayakan Natal. Fatwa itu merupakan serangan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang menggalakkan program kerukunan antara umat bergama, terlebih karena kerusuhan yang terjadi antar umat Islam dan Nasrani pada awal tahun 1970-an di berbagai daerah<sup>13</sup>.

Sikap Hamka yang memilih mengundurkan diri daripada mengkhianati keyakinan keagamaannya menjadi bukti nyata independensi moral seorang pemimpin Islam. Sikap tersebut juga sesuai dengan tulisannya yakni jalankanlah pimpinan di dalam garis agama dengan jalan yang lurus.<sup>14</sup> Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dalam kepemimpinan harus tegak lurus dengan nilai agama juga sarana untuk menegakkan nilai kebenaran dan menjaga kemurnian iman. Gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan nilai amanah dalam Islam, di mana pemimpin bertanggung jawab kepada Allah lebih dulu sebelum kepada manusia. Dengan demikian, Hamka menampilkan sosok *khalifah fil-ardh* atau pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai amanah Ilahi.

### 3. Prinsip Islam dalam Kepemimpinan Buya Hamka

Buya Hamka memadukan tiga prinsip utama dalam kepemimpinannya:

1. Amanah dan Akhlak: Pemimpin harus jujur, adil, dan menepati janji, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58.

Dalam bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Azhar*, Hamka (1983) menuliskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab<sup>15</sup>. Orang yang menerima tanggung jawab harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya, karena di situlah letak kepercayaan Allah dan manusia kepadanya.

2. Musyawarah: Setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama para ulama, sesuai prinsip *syura* (QS. Asy-Syura: 38).

<sup>13</sup> Amin and Dosen, "MODEL KEPEMIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): SEBUAH TAWARAN UNTUK MASA DEPAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI INDONESIA."

<sup>14</sup> Hamka, *Mutiara Filsafat*.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

Dalam buku *Tafsir Al-Azhar*, Hamka (1983) menjelaskan bahwa pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mau mendengar dan melakukan musyawarah<sup>16</sup>. Prinsip ini juga beberapa kali muncul dalam ceramah Hamka tahun 1950-an.

3. Dakwah bil Hikmah: Hamka menekankan pentingnya berdakwah dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, bukan dengan paksaan atau politik konfrontatif.

Dalam buku *Falsafah Hidup*, Hamka (1950) menegaskan bahwa dakwah semestinya harus dilakukan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan yang menuntun manusia kepada kebenaran, bukan dengan kekerasan atau sikap memusuhi.<sup>17</sup> Prinsip ini terlihat pada gaya Hamka yang mengedepankan argumentasi dan dialog, bukan tekanan politik pada masa kepemimpinannya di MUI.

Ketiga prinsip tersebut menjadikan kepemimpinan Hamka berkarakter spiritual dan humanistik, serta tegas terhadap prinsip, namun tetap lembut terhadap manusia.

#### 4. Relevansi Kepemimpinan Buya Hamka bagi Organisasi Islam Modern

Kepemimpinan Hamka memberikan pelajaran penting bagi organisasi Islam masa kini, yang sering dihadapkan pada dilema antara nilai dan kepentingan pragmatis. Dalam era modern, organisasi keagamaan kerap mengalami erosi moral. Prinsip-prinsip yang sebelumnya pernah diterapkan oleh Hamka dapat dijadikan model rujukan dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks pada masa modern.

Model kepemimpinan Buya Hamka mencerminkan suatu bentuk kepemimpinan berbasis nilai (*value-based leadership*), yaitu kepemimpinan yang berdasar pada prinsip moral, spiritual, dan kemanusiaan khususnya universal Islam. Bagi Hamka, kepemimpinan bukan semata urusan kekuasaan, tetapi amanah moral dan tanggung jawab ilahiah. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan kejujuran dan keinsafan<sup>18</sup>. Dalam pandangan ini, kepemimpinan menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuasaan.

---

<sup>16</sup> Hamka.

<sup>17</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*.

<sup>18</sup> Hamka.

Prinsip pertama dari kepemimpinan berbasis nilai dalam pemikiran Hamka adalah integritas dan amanah.

Hamka menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan ijtihad intelektual sebagai bagian dari kepemimpinan bernilai. Dalam *Lembaga Budi*, Ia menyatakan bahwa akal dan hati adalah dua pilar manusia yang tidak boleh terpisah; akal menimbang benar-salah, hati menimbang baik-buruk<sup>19</sup>. Pemimpin yang bernilai adalah pemimpin yang mampu berpikir kritis, terbuka terhadap pembaruan, namun tetap berakar pada prinsip tauhid. Bagi Hamka, Islam tidak menolak kemajuan, justru mendorong pemeluknya untuk berijtihad agar mampu menjawab persoalan zaman dengan kebijaksanaan.

Prinsip lainnya yang menonjol dalam model kepemimpinan Hamka adalah keberanian moral (*moral courage*). Keputusan Buya Hamka untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1981 setelah pemerintah menolak fatwanya tentang larangan umat Islam menghadiri perayaan Natal bersama, merupakan bukti nyata keteguhan moral tersebut. Sikapnya itu bukan hanya sekadar protes politik, melainkan refleksi dari komitmennya yang tinggi dari awal. Keberanian moral inilah yang menjadikan model kepemimpinan Hamka tetap relevan, karena dalam konteks modern, banyak pemimpin keagamaan yang kehilangan keberanian untuk menegakkan kebenaran akibat tekanan politik atau kepentingan pragmatis.

Selain ketiga aspek utama tersebut, model kepemimpinan Buya Hamka juga menonjol karena kemampuannya memadukan spiritualitas dan humanitas. Dalam *Falsafah Hidup*, Ia menulis, agama bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengatur akhlak dan kehidupan sosial agar manusia saling menghormati dan mencintai”<sup>20</sup>. Pandangan ini memperlihatkan model kepemimpinan Hamka yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia, di mana pemimpin tidak hanya dituntut tegas terhadap prinsip, tetapi juga lembut terhadap manusia.

---

<sup>19</sup> Hamka, *Lembaga Budi*.

<sup>20</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*.



Dengan demikian, model kepemimpinan Buya Hamka menawarkan model bagi organisasi Islam modern, sebuah model kepemimpinan berbasis nilai (*value-based*) yang menggabungkan integritas moral, kebebasan berpikir, dan keberanian etis. Pendekatan ini sangat penting bagi pemimpin lembaga keagamaan, pendidikan, maupun politik dalam menjaga kredibilitas dan otoritas moral di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasir (2008), Hamka bukan hanya seorang ulama dan sastrawan, tetapi juga teladan kepemimpinan profetik yang menegakkan nilai, bukan kekuasaan<sup>21</sup>. Dalam konteks modern, nilai-nilai kepemimpinan Hamka memberikan inspirasi bagi lahirnya pemimpin Islam yang berjiwa etik, reflektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## E. Kesimpulan

Kepemimpinan Buya Hamka di Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencerminkan sosok ulama yang menggabungkan integritas moral, kecerdasan intelektual, dan ketulusan spiritual dalam satu kesatuan nilai kepemimpinan. Dalam historis Orde Baru yang sarat dengan tekanan politik dan upaya kontrol terhadap lembaga keagamaan, Hamka mampu mempertahankan independensi moralnya dengan menegaskan bahwa MUI harus menjadi suara hati nurani umat, bukan alat kekuasaan. Gaya kepemimpinan Buya Hamka bersandar pada prinsip kepemimpinan moral yang menegakkan nilai amanah, akhlak, musyawarah, dan dakwah. Keberanian moralnya dalam mempertahankan prinsip, bahkan ketika harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI, membuktikan keteladanannya sebagai seorang pemimpin yang lebih mengutamakan kebenaran agama daripada kepentingan politik.

Prinsip-prinsip kepemimpinan Buya Hamka, seperti integritas, kebebasan berpikir, dan keberanian etis, tetap relevan bagi organisasi Islam modern yang menghadapi tantangan nilai, moralitas, dan tekanan pragmatisme zaman. Kepemimpinan beliau menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan tujuan itu sendiri. Dengan demikian, model kepemimpinan Buya Hamka merupakan cerminan

---

<sup>21</sup> Nasir, *Pemimpin Profetik Dalam Perspektif Islam*.

kepemimpinan profetik berbasis nilai (*value-based leadership*) yang berlandaskan iman, akhlak, dan kemanusiaan universal.

### Daftar Pustaka

Amin, Surahman, and Dosen. “MODEL KEPEMIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): SEBUAH TAWARAN UNTUK MASA DEPAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI INDONESIA.” *Transformasi: Jurna Kepemimpinan & Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 0–16.

Arfah, M. Arfah. 2023. “Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam”. *Jurnal Literasiologi* 10 (2).

<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.589>.

Burns, James MacGregor. *Leadership*. New York: Harper & Row, 1978.

Hamka. *Falsafah Hidup*, 1950.

Hamka. *Lembaga Budi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1951.

Hamka. *Mutiara Filsafat*. Jakarta: Widjaya, 1954.

Hamka. *Tafsir Al-Ahzar*. Pustaka Nasional, 1983.

Nasir, Yudi. *Pemimpin Profetik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gramedia., 2008.

Rouf, Muhammad. “KEPEMIMPINAN MORAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM; TELAAH MODEL SPIRITUAL DAN PROFETIK” 2 (2022): 421–33.

Wildan Insan Fauzi. “HAMKA Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975–1981.” *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2017).



[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=7KBL7MMAAAAJ&citation\\_for\\_view=7KBL7MMAAAAJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7KBL7MMAAAAJ&citation_for_view=7KBL7MMAAAAJ:qjMakFHDy7sC).

Yahfis, El Firdausia, and Hermandra Sinaga, Mangatur. “Kata Batu Dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif,” n.d., 248–57.

Yolanda, Mardivta, Sonia Wulandari, Universitas Islam, Negeri Imam, and Bonjol Padang. “KONSEP KEPEMIMPINAN ABAD 21 DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM” 1 (2020): 110–25.

Yudi, Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.

